

SARESEHAN : MENANGKAP ASPIRASI MASYARAKAT TERHADAP KEBUTUHAN LAYANAN FUNGSI KEPOLISIAN DI ERA GLOBALISASI.

Pelaksanaan :

Pada tanggal 10 Januari 2001 bertempat di Ruang Rapat Dislitbang Polri, pukul 14.00 WIB s/d. 17.30 WIB telah dilaksanakan saresehan dengan topik "Menangkap aspirasi masyarakat terhadap kebutuhan layanan fungsi kepolisian di era globalisasi"; dengan nara sumber Drs. Mulyana W Kusuma SH MA dan Moenir SH

Dalam saresehan tersebut Drs. Mulyana W. Kusumah SH. MA mengemukakan sebagai berikut :

Medan Sosial Politik atau gagasan yang berkembang saat ini di masyarakat adalah justru yang paling besar adalah semakin kuatnya eskalasi Konflik.

Ada tipe konflik yang berkembang antara lain :

1. Konflik antara Pusat dan Daerah.
Di mana fenomena ini berkembang di masyarakat yang bisa mengakibatkan atau mengarah kepada Disintegrasi Bangsa.
2. Konflik Sektoral.
Bagian negara melakukan praktek-praktek perampasan hak-hak rakyat

di banyak daerah, sehingga muncul gerakan-gerakan atau aksi-aksi dari para peani untuk menguasai tanah serta melawan hukum yang dahulu diambil alih secara paksa, atau aksi-aksi buruh yang semakin menggejala dan muncul kepermukaan dan semakin besar, sedangkan yang menjadi obyek konflik adalah adanya perbedaan antar daerah dan aksi-aksi buruh.

3. Konflik komunal/horisontal.
Sejak th. 1960 – 1990 dari 256 konflik horisontal banyak terjadi di negara-negara yang tengah mengalami transisi demokrasi.
4. Konflik antar elit politik.
Adalah pertarungan elit politik menuju kepada elit kekuasaan dan ini bisa menajam apa bila mekanisme formal tidak pas/kurang akomodatif. Konsepsi Polri kedepan harus memperhatikan dinamika permasalahan yang berkembang di masyarakat. Contoh : Kemungkinan Desember Hitam akan terjadi (kata Pangdam Jaya).

Oleh karenanya aksi-aksi besar yang muncul pada malam Natal semestinya sudah dicium oleh intel. Maka dari itu mengamati medan konflik bisa menangkap keinginan masyarakat.

5. *Ketetapan MPR NO. VII th. 2000*, menyatakan kesatuan Nasional dapat dilakukan dengan rekonsiliasi Nasional sebagai suatu cara menyelesaikan pelanggaran politik, Sara dan lain-lain. Peranan dalam kontek Rekonsiliasi Nasional menjadi penting karena untuk dapat memelihara kesatuan bangsa secara Nasional.

6. *Transisional Justis atau keadilan restonasi* adalah suatu bentuk pengingkaran melalui penegakan keadilan.

Seperti: Kasus Ajinomoto, merupakan penambah beban bagi law enforcement terhadap UU Konsumen.

Sedangkan Moenir SH. Mengemukakan pandangannya sbb:

Bahwa persoalan yang cukup menonjol di masyarakat dalam hubungannya dengan Polisi - HAM dan masyarakat ada beberapa tipologi, problema yang dapat menonjol yang menimbulkan kritik-kritik terhadap Polri

1. Dalam Konflik Struktural.
Contoh Polisi dengan Petani.

2. Struktur kerja masih mendominasi struktur lama, sehingga selalu berhadapan dengan masyarakat.

3. Pola pengamanan dalam simbol-simbol negara.

Seperti ; Problem Politik lama, dalam konteks Soeharto banyak terjadi clas. Sehingga mencermarkan proses kerja polisi.

4. Kekerasan polisi yang menjadikan konflik di wilayah Aceh, dan Ambon, merupakan kekerasan yang lahir akibat konflik wilayah, proses kekerasan ini terus berlangsung tanpa ada kebijaksanaan yang jelas. Dalam penyelesaian proses pelanggaran harus ada level-level penyelesaian, misal petani mengenai land reform.

5. Kegagalan Polri, dalam penyelesaian kasus bom, akibat intervensi Politik.

6. Aktor terdepan dalam pemberian mandat oleh pemerintah dalam melakukan penegakan hukum adalah Polisi. Kemudian bagaimana Polisi mengambil sikap terhadap By Comission dan By omossio, lalu siapa yang dilindungi, karena didalam sistem hukum kita tidak ada perbedaan, civil / warga.

7. Kegagalan Polisi dari segi HAM tidak bisa melindungi masyarakat. HAM tidak membedakan siapa yang

dilindungi yang dilindungi; adalah sipil/warga dan bila polisi di aniaya tidak dalam konteks HAM. tapi Pidana sesuai Convensi Geneva 1949. Sedangkan konflik di Aceh subyeknya adalah pembontak, jadi dalam hal ini tentara yang harus menghadapi bukan polisi, karena itu perlu ada Declare secara tegas oleh pemerintah. Karena selama ini Polri belum mampu melihat permasalahan yang harus diselesaikan oleh Polri sendiri.

8. Pelanggar HAM bukan saja masyarakat tapi polisi juga sebagai pelanggar HAM tapi prioritas adalah masyarakat bila polisi di keroyok/digebugi mahasiswa ini merupakan dominasi yang lebih kuat artinya siapa yang boleh dihukum apabila polisi yang dihukum massa, ini akan menjadi persoalan serius.

Menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari audience Moenir SH mengemukakan sbb:

- Beralihnya konstruksi kekuasaan lama yang runtuh sedangkan konstruksi yang baru belum tumbuh/berdiri.
- Kekuasaan politik tidak dalam kerangka berpikir yang sama dengan semangat membangun sistem lama.
- Polisi merupakan bagian dari konstruksi lama.
- Bagaimana polisi bisa mengambil jarak dari situasi sekarang.
- Supremasi sipil dapat mendukung pemerintah sipil (upaya kompromi politik)
- Bagaimana membangun hubungan Polri dengan masyarakat.
- Hak Asasi Manusia ada perbedaan antara Polisi dengan masyarakat
- Ketika polisi sedang menjalankan tugasnya adalah merupakan alat negara.
- Tantangan profesionalisme Polri.
- Peningkatan profesionalisme polisi harus sampai tingkat terdah di lapangan (kita harus belajar dari polisi Inggris, baik metode dan pola pendidikan di Polri).
- Proteksi terhadap pelanggaran oleh Polri terhadap masyarakat (sebagai suatu alat ukur terhadap polisi)
- Polisi harus berani terbuka dan harus melakukan tindakan kongkrit dan Polri tidak boleh menuntut masyarakat terlalu besar.
- Bila Polri bekerja secara normatif maka tidak akan terjadi bom meledak.
- Kalau normatif saja maka susah untuk menjalankan secara fleksibel. Contoh : Bila ingin berjalan maka perlu pendekatan fungsi lain seperti bimmas karena sampai saat ini fungsi ini belum bisa menyentuh.
- Polisi sebagai unsur untuk memelihara keamanan sedang yang menciptakan keamanan untuk masyarakat sendiri
 1. Law enforcement justru belum kelihatan
 2. Public service

3. Harus ada prioritas, misal ;
 - Lalulintas dulu yang diprioritaskan (urusan STNK, SIM kemudian),
 - Tugas Pori yang berhubungan dengan perijinan-perijinan
- Persoalan terhadap Aceh. Perlu melihat sepanjang persoalan Aceh masih digantung maka persoalan yang dihadapi tidak akan kunjung selesai maka perlu ada keputusan politik.
- Bila pemberontakan GAM masih dianggap GPK maka Polri yang harus menyelesaikan bukan TNI. Tidak ada yang menuntut polisi dapat menyelesaikan masalah Aceh.
- Semakin dilihat dengan kekuasaan semakin sulit di hukum dan sebaliknya.
- Realitas main hakim sendiri, kekacauan sosial adalah akibat dari kekecewaan masyarakat terhadap sistem yang berlaku.
- Adanya tuntutan kelas menengah semakin kuat.
- Tekanan publik terhadap Polri makin tinggi.
- Dinamika masyarakat dan tuntutan demo masyarakat yang sangat tinggi.
- Rekonsiliasi komunikasi nasional untuk meraih support dari masyarakat.
- Polri sebagai penegak hukum bukan partisipan.
- Kecenderungan adanya stagnasi nasional.
- Adanya perbedaan hubungan antara parlemen dengan presiden.
- Masalah main hakim sendiri adalah karena adanya pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat.
- Street Justice
 - a. Adanya pola kejahatan dari masyarakat (pembakaran dan lain-lain)
 - b. Mekanisme dari solidaritas sosial yang spontanitas dari masyarakat sekitar pedagang kaki 5 dll)

Selanjutnya Mulyana W Kusuma menanggapi sebagai berikut :

Rasullah SAW bersabda:

- Tolonglah saudaramu yang berbuat aniaya maupun yang teraniaya
- Tolonglah mereka dengan cara menahan tangan mereka dari berbuat aniaya.